

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk di negara maju, adalah kemiskinan. Hal ini juga berlaku untuk pemerintah negara berkembang Indonesia. Tingkat hidup sebagian besar penduduk Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara maju. Tingkat pendapatan yang rendah atau tingkat kemiskinan yang tinggi adalah bukti rendahnya standar hidup ini.¹

Beberapa akibat dari tingkat kemiskinan yang tinggi di suatu wilayah termasuk peningkatan kriminalitas, pengangguran, gangguan kesehatan yang menyebabkan tingginya angka kematian, konflik sosial, politik, dan lainnya.² Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan kemiskinan di Provinsi Banten cenderung sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional. Meskipun tren kemiskinan umumnya menurun, pada tahun 2020-2023 terjadi peningkatan jumlah kemiskinan di Provinsi Banten.

Pada tahun 2020-2023 terjadinya peningkatan jumlah kemiskinan merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang tidak hanya dirasakan oleh Provinsi Banten saja namun hampir di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan kerentanan yang ditunjukkan oleh fluktuasi yang terjadi.³

¹ Cici Kurnia Sari Lubis, dkk (2024). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Papua Barat, *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 5(2), 469. <https://rayyanjurnal.com/index.php/mantap/article/view/2957>

² Hasrini Hamun, dkk (2024). Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur, *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(5), 1140. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/11809>

³ Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2024), *Laporan Perkembangan Ekonomi Dan Fiskal Daerah*, h. 19

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Banten**

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
Kab. Pandeglang	120.440	131.430	114.650	114.230
Kab. Lebak	120.830	134.750	177.220	114.540
Kab. Tangerang	242.160	272.350	270.520	276.330
Kab. Serang	74.800	83.090	75.450	73.830
Kota Tangerang	118.220	134.240	132.880	137.700
Kota Cilegon	16.310	18.890	16.460	18.200
Kota Serang	42.240	47.910	42.560	44.990
Kota Tangerang Selatan	40.990	44.570	44.290	46.310
Provinsi Banten	775.990	867.230	814.020	826.130

Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada tahun 2020-2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini diakibatkan oleh banyaknya pengurangan tenaga kerja oleh beberapa perusahaan akibat dari COVID-19, sehingga tingkat pengangguran semakin meningkat pula.

Menurut Sukirno, pengangguran akan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai. Di mana masalah kemiskinan akan muncul karena penurunan tingkat kemakmuran. Dengan pertumbuhan angkatan kerja yang cepat, perekonomian akan menghadapi tantangan tambahan karena perluasan atau penciptaan lapangan kerja baru.⁴

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran menurut Badan

⁴ Sadono Sukirno. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. (Jakarta: Kencana), h. 87

Pusat Statistik (BPS), adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan bisnis baru, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.⁵ Pengangguran di suatu wilayah dapat diperparah jika ada peningkatan besar dalam jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang memadai. Tingkat pengangguran tinggi dapat menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan negara.⁶

Berdasarkan laporan perekonomian Provinsi Banten pada November 2023, Perekonomian Provinsi Banten tercatat tumbuh positif pada triwulan III 2023 yaitu sebesar 4,97% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,83%). Pertumbuhan triwulan III tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional (4,94% yoy) maupun regional Jawa (4,83% yoy).⁷

Membaiknya pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten. TPT pada periode Agustus 2023 yang tercatat sebesar 7,52% menurun dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar 8,09%. TPT tercatat semakin menurun sejak puncaknya pada Agustus 2020 yang mencapai 10,64%. Angka ini juga tercatat lebih rendah dibandingkan Tingkat Pengangguran sebelum pandemi Covid-19 yang mencapai 8,16%. Demikian pula dengan tingkat kemiskinan yang kembali melanjutkan tren penurunan menjadi 6,17%. Dari sisi distribusi pendapatan penduduk, tingkat ketimpangan di Banten sebesar 0,368%.

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

⁶ Anggun A. dan Nurul A. A. Z. (2024). pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB, dan Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017-2022, *Journal Of International Taxation Accounting and Auditing*, 4(1), 67.

<https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JITAA/article/view/1169>

⁷ Bank Indonesia, "Laporan Perekonomian Provinsi", diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Banten-November-2023.aspx> pada tanggal 1 Januari 2025, pukul 11.45 WIB.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu tolak ukur kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan, yang dibangun berdasarkan pendekatan tiga dimensi dasar: pengetahuan (*knowledge*), umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), dan standar kehidupan yang layak (*a decent standard of living*).⁸

IPM adalah indikator penting untuk menilai efektivitas upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. IPM mencerminkan akses masyarakat terhadap hal-hal penting seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, yang jika terpenuhi dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan.⁹

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
Kab. Pandeglang	68,86%	69,02%	69,70%	70,28%
Kab. Lebak	66,39%	66,50%	67,19%	67,68%
Kab. Tangerang	74,09%	74,47%	75,15%	75,56%
Kab. Serang	70,93%	71,05%	71,99%	72,63%
Kota Tangerang	79,83%	80,08%	80,44%	80,98%
Kota Cilegon	76,80%	77,11%	77,68%	78,24%
Kota Serang	75,25%	75,53%	76,01%	76,43%
Kota Tangerang Selatan	82,73%	82,98%	83,28%	83,57%
Provinsi Banten	74,41%	74,68%	75,25%	75,77%

Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada periode 2020-2023 di tiap-tiap Kabupaten/Kota terdapat sedikit peningkatan dalam setiap tahunnya, di Provinsi Banten sendiri pada tahun

⁸ Hasrini Hamun, dkk. Pengaruh Pengangguran, ..., h. 1140

⁹ Anggun A. dan Nurul Azizah Az Zakiyyah. pengaruh Indeks, ..., h. 67

2020 tercatat sebesar 74,41%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 74,68%, kemudian pada tahun 2022-2023 sebesar 75,25% dan 75,77%.¹⁰

Produktivitas kerja penduduk yang rendah disebabkan oleh penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Produktivitas yang rendah ini mengakibatkan penurunan perolehan pendapatan, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2023”**

B. Identifikasi Masalah

1. Beberapa akibat dari tingkat kemiskinan yang tinggi di suatu wilayah disebabkan oleh peningkatan kriminalitas, pengangguran, gangguan kesehatan yang menyebabkan tingginya angka kematian, konflik sosial, politik, dan lainnya.
2. Pengangguran akan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai.
3. Kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada indeks pembangunan manusia dapat menyebabkan tingkat kemiskinan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi penelitian ini pada Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di

¹⁰ Provinsi Banten Dalam Angka (2024). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2020-2023*, h. 440

Provinsi Banten Tahun 2020-2023. Hal ini ditujukan agar peneliti lebih terarah dan fokus serta tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2020-2023?
2. Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2020-2023?
3. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2020-2023?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2020-2023
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2020-2023
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2020-2023

F. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, terkhususnya:

a. Bagi penulis dan pembaca

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca sebagai penambah wawasan melalui terapan ilmu dan teori yang telah diperoleh mengenai bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.

b. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam menambah informasi sebagai referensi dalam menyusun penelitian selanjutnya. Khususnya untuk fakultas ekonomi dan bisnis islam jurusan ekonomi syariah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dan bahan penilaian dalam pengambilan kebijakan dimasa mendatang, terutama menyangkut mengenai pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai permasalahan ekonomi yaitu tentang pengaruhnya tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORETIS

Pada bab ini, menjelaskan mengenai teori-teori mengenai masing-masing variabel serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data yang diteliti, populasi dan sampel serta metode analisis data, dan pengujian hipotesis data.

BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, dan pengujian data yang kemudian ditarik kesimpulannya disertai dengan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang sudah diteliti serta penyampaian saran-saran pada pihak tertentu.